



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten
Temanggung

Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Kode Pos 56227
Telp. (0293) 491127 Fax. (0293) 493927
Website : www.dindukcapil.temanggungkab.go.id
Sms Gateway : 085 625 222 77

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari RPJMD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2022.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**



N. BAGUS PINUNJUN, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINDUKCAPIL TAHUN 2019	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dindukcapil Tahun 2019 dan Capaian Renstra DindukCapil	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dindukcapil	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dindukcapil	48
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	59
2.7 Penghargaan	63
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	64
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV. PENUTUP	80

Temanggung, 17 September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022**

Disusun oleh :

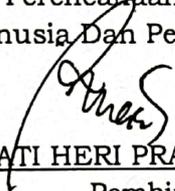
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2022**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator

Bidang Perencanaan Pembangunan
Manusia Dan Pemerintahan


RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM

Pembina

NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator

Bidang Perencanaan Pembangunan
Manusia Dan Pemerintahan

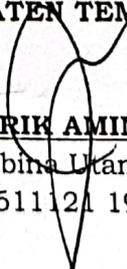

EKO BUDI MULYANTO, SE, MM

Pembina

NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**


Ir. C MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

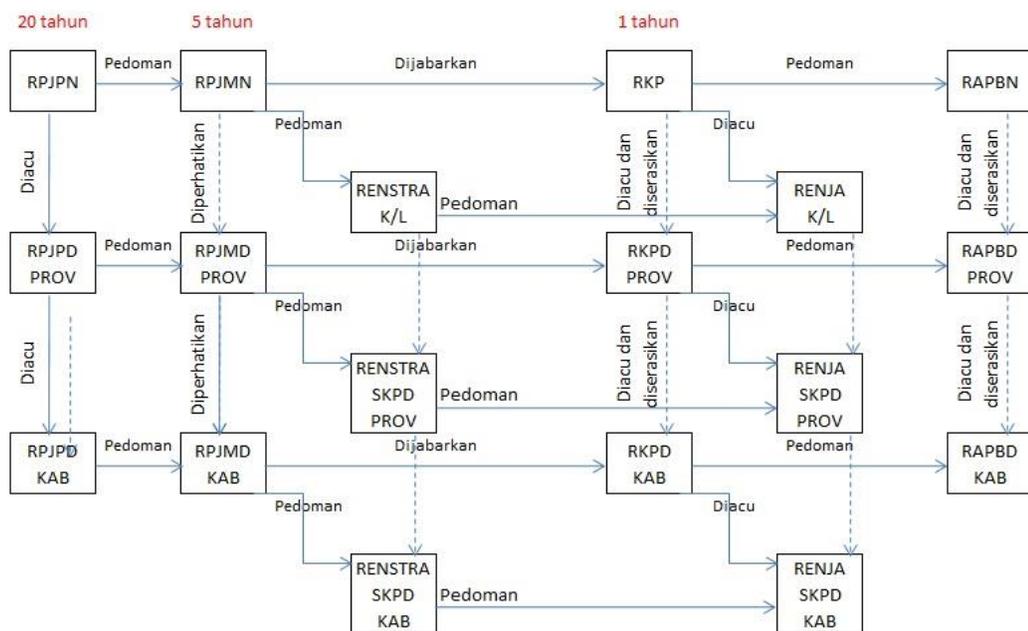
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- 12) Informasi lainterkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tahun lalu berdasarkan Renstra** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun dalam proses ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022).

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IVPENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Tahun 2020

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K (%)	Rp (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	70	18.913.068.889	14	2.824.043.372	14	2.308.074.739	1.737.081.772	14								
Belanja Langsung																			
A																			
1	Program Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk																		
a	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya verifikasi/validasi dan pelayanan surat pindah penduduk baik masuk maupun keluar Kab. Temanggung	bulan	89	478.775.400	27	82.847.800	19	90.000.000	24.946.600	14	24.884.300	73,68	99,75	41	107.732.100	49,40.	22,50	
b	Penerbitan Kartu Identitas Anak	terbitnya Kartu Identitas Anak untuk anak usia 0-17 tahun	keping	220.000	972.485.000	21,184	155.189.500,00	20,000	170.000.000,00	36.533.400,00	18433	32.643.673,00	92,17	89,35	39617	187.833.173,00	18,01	19,31	
2	Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil																		
a	Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian bekerjasama	Terbitnya akta kelahiran dan kematian bekerjasama	akta	555000	436950500,00	27,671	96.070.525,00	10000	100.000.000,00	16.529000,00	10575	16.450.000	100	99,52	38246	112.520.525,00	68,91	25,75	

	kematian	dengan instansi terkait dan stakeholder																	
b.	Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Terbitnya akta perkawinan dan perceraian non muslim	akta	117 5	119,652,000,0 0	209	12,477,700,0 0	225	20,000,000,0 0	2,542,300,00	148	2,542,300,0 0	65,7 8	100	357	15,020,000 ,00	30,38	12,55	
c.	Penataan dan pemeliharaan dokumen negara	Terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian	buku	200 0	300,000,000,0 0	360	40,599,250,0 0	400	42,500,000,0 0	21,328,800,00	0	20,085,800, 00	0	94,17	360	60,685,050 ,00	18,00	20,23	
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data																		
a	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	terpeliharanya Database kepend. Serta keamanan jarkomdat SIAK, terpeliharanya peralatan e-KTP serta koneksi dengan provinsi dan Depdagri	bulan	60	1,120,800,000 ,00	12	263,079,950, 00	12	240,000,000, 00	164,288,600,00	12	153,925,236 ,00	100	93,69	24	417,005,18 6,00	40,00	25,03	
b	Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jenis	13	240,000,000,0 0	12	46,492,000,0 0	3	42,500,000,0 0	20,509,000,00	3	20,491,000, 00	100	99,91	15	66,983,000 ,00	100	27,91	
c	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP el	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP el	bulan	60	4,000,000,000 ,00	12	980,805,000, 00	12	1,000,000,00 0,00	238,600,000,00	12	197,041,833 ,00	100	98,83	24	1,177,846, 833,00	40,00	25,35	

d.	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi kependudukan	warga masyarakat Temanggung, kepemilikan KK 97%, KTP-el 97,8% KIA 70,1%, Akta Kelahiran 70%, surat pindah 100%, akta kematian 96%	268 850	9,875,720,100 ,00	12	1,688,526,21 4,00	7800 0	1,991,860,00 0,00	2,526,560,000,00	672 48	1,999,154,4 57,00	86,2 2	4,03	6726 0	3,687,680, 671,00	25,02	18,13	
4																			
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi	Tersusunnya dokumen perencanaan	60	29,773,200,00	34	3,306,750,00	33	5,000,000,00	760,000,00	33	760,000,00	100	100	67	4,066,750, 00	100	13,66	
5																			
a.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan internet	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan	60	456,800,000,0 0	12	101,834,699, 00	12	135,000,000, 00	135,000,000,00	12	120,086,013 ,00	100	88,95	24	221,920,71 2,00	40,00	48,58	
b.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	60	451,998,100,0 0	12	87,824,281,0 0	12	80,000,000,0 0	85,026,900,00	12	83,815,538, 00	100	99	24	171,639,81 9,00	40,00	37,97	
c.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk keperluan administrasi kantor	Tersedianya ATK kantor 12 bulan	60	134,582,500,0 0	12	22,727,000,0 0	12	20,000,000,0 0	8,063,100,00	12	8,062,500,0 0	100	100	24	30,789,500, ,00	40,00	22,88	

d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya formulir dan blangko kependudukan dan capil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor selama 12 bulan	60	270,496,250,00	12	44,341,000,00	12	55,000,000,00	1,703,700,00	12	1,475,500,00	100	86,61	24	45,816,500,00	40,00	16,94
e.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	60	80,483,000,00	12	12,933,000,00	12	14,500,000,00	10,860,000,00	12	10,671,500,00	100	98,26	24	23,604,500,00	40,00	29,33
f.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/ surat kabar	bulan	60	30,480,000,00	12	5,340,000,00	12	4,500,000,00	2,395,000,00	12	2,388,000,00	100	100	24	7,728,000,00	40,00	25,35
g.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman harian, rapat & tamu dan ekstra fooding petugas arsip	Tersedianya makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan	60	162,490,000,00	12	27,649,800,00	12	33,000,000,00	22,391,000,00	12	22,381,300,00	100	100	24	50,031,100,00	40,00	30,79
h.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya koordinasi & konsultasi dengan pemerintah Kab/kota lain, pemprov & pemerintah pusat	Terlaksananya koordinasi luar daerah selama 12 bulan	60	274,994,000,00	12	51,383,500,00	12	57,000,000,00	39,288,850,00	12	23,241,300,00	100	59	24	74,624,800,00	40,00	27,14
i.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya koordinasi dan konsultasi dg	Terlaksananya koordinasi	60	30,967,000,00	12	8,615,300,00	12	7,500,000,00	1,540,000,00	12	805,000,00	100	52,27	24	9,420,300,00	40,00	30,42

		instansi terkait	dalam daerah selama 12 bulan																
j.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Tersedianya biaya pengiriman dokumen via serta lembur	Terbayar ya gaji supporting staf, tersedianya uang lembur dan biaya pengiriman dokumen kepend selama 12 bulan	60	3,107,498,240,00	12	600,838,240,00	12	600,000,000,00	566,920,000,00	12	554,055,776,00	100	97,73	24	1,154,894,016,00	40,00	37,16	
k.	Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor		Terbayar ya honor 4 orang satpam selama 12 bulan	60	346,500,000,00	0	0	12	126,000,000,00	126,000,000,00	12	121,449,892,00	100	96,39	12	121,449,892,00	20,00	35,05	
6																			
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	5	865,000,000,00	1	162,477,344,00	1	110,000,000,00	0	1	0,00	100	#DIV/0!	2	162,477,344,00	40,00	18,78	

b.	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor yang memadai	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	5	299,820,400,00	1	45,265,000,00	1	76,000,000,00	1,698,000,00	1	1,698,000,00	100	100	2	46,963,000,00	40,00	15,66	
c.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan	60	450,419,550,00	12	113,911,900,00	12	100,000,000,00	68,965,000,00	12	68,831,905,00	100	99,81	24	182,743,805,00	40,00	40,57	
d.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya BBM untuk kendaraan dinas selama 12 bulan	60	563,488,100,00	12	60,622,594,00	12	97,000,000,00	60,081,500,00	12	56,155,164,00	100	93,46	24	116,777,758,00	40,00	20,72	
e.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan	60	51,000,000,00	12	7,333,000,00	12	8,500,000,00	4,705,000,00	12	3,814,350,00	100	81,07	24	11,147,350,00	40,00	21,86	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
 - b. Cakupan pelayanan Akta perkawinan tepat waktu
 - c. Cakupan pelaporan akta perkawinan dan perceraian tepat waktu
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Presentase kepemilikan KTP el
 - c. Presentase penerbitan akta kematian
 - d. Presentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 - e. Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - b. Presentase kepemilikan Akta Kelahiran
 - c. Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik

Faktor tidak tercapainya target dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KIA dan Akta Kelahiran khususnya untuk usia lansia sementara untuk sarana prasarana adminduk ada beberapa yang masih asset pusat sehingga dinas tidak sdapat melaksanakan perbaikan . dengan tidak tercapainya target maka hak masyarakat untuk mendaftarkan dokumen kependudukan KIA dan Akta Kelahiran belum dapat terpenuhi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisai Administrasi kependudukan dan juga melaksanakan jemput bola untuk pembuatan Dokumen kependudukan hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membuat dokumen kependudukan sehingga target kepemilikan dokumen kependudukan dapat meningkat.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori *Sangat Baik* yaitu dengan nilai **93.14 %**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Capaian Kinerja : 93.83 % kategori sangat baik
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
Capaian Kinerja : 95 % kategori sangat baik
3. Peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
Capaian Kinerja : 92.36 % kategori sangat baik
4. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
Capaian Kinerja : 86.62 % kategori sangat baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA		CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS		
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020		TT	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	17	18	19
A	Bidang : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
		INDIKATOR SASARAN													
		Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	angka	76	77	78	79	80	81	76	76	93,83		AT	
		INDIKATOR PROGRAM													
1	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	96,98	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,54	98,15	100	TT		
					Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga					257.391	257.772				
					Jumlah Kepala Keluarga					263.885	262.643				
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	96,8	97,4	97,8	98,2	98,6	99	99,51	98,16	99,15	TT		
					Jml Pemilik KTP el					589.079	583.924				
					Jml wajib KTP el					591.955	594.852				
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	45,51	70	70,1	70,2	70,3	70,4	52,83	56,92	80,85		AT	
					Jml pemilik KIA					117.231	132.497				
					jml wajib KIA					221.911	232.777				
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		
					jml penerbitan surat pindah					9.176	13.494				
					Jml pemohon surat pindah					9.176	13.494				
2	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan Akte	%	67,68	69	70	75	80	90	67,07	69,37	77,08		AT	
					jml penduduk ber akte					530.737					

		Kelahiran							551.910					
			jumlah penduduk						791.264	95.556				
		Persentase penerbitan akte kematian	%	100	95	96	96,5	97	97,5	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte kematian						8.666	5.023				
			Jml pemohon Akte Kematian						8.666	5.023				
		Cakupan pelayanan akte perkawinan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte perkawinan						133	151				
			jml pemohon akte perkawinan						133	151				
		Cakupan pelayanan akte perceraian tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT	
			Jml penerbitan akte cerai						32	40				
			jml pemohon akte cerai						32	40				
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	54	85	85	90	90	90	50	53,87	59,85	AT	
			prasarana kondisi baik						324	376				
			prasarana tersedia						648	698				
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	33,3	60	70	80	90	100	100	100	100	TT	
			Jml Perangkat daerah yang telah PKS						21	21				
			OPD pengguna data						21	21				
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	38,71	30	40	50	60	70	64,52	93,55	100	TT	
			jumlah Inovasi layanan						20	29				
			jenis layanan						31	31				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:
 - a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat akan pentingnya dok kependudukan (KK) untuk kepentingan untuk kepentingan pengurusan surat2,perbankan dll
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - jemput bola pemuktahiran data kependudukan ke Desa2
 - sosialisasi tentang adminduk
 - inovasi2 yang terus dilaksnakan dalam rangka kemudahan dan percepatan penerbitan dok kependudukan
 - b. Presentase Kepemilikan KTP-el
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat akan pentingnya Ktp-el untuk kepentingan pengurusan surat2,perbankan dll
 - jemput bola perekaman KTP el ke sekolah-sekolah
 - jemput bola perekaman ktp el untuk warga sakit, usia lanjut dan warga berkebutuhan khusus
 - pelayanan mobil keliling pada acara atau event yang diselenggarakan oleh pemkab temanggung
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang kesadaran dari penduduk untuk update data kependudukan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah
 - jemput bola perekaman ktp el untuk warga sakit, usia lanjut dan warga berkebutuhan khusus

- pelayanan mobil keliling pada acara atau event yang diselenggarakan oleh pemkab temanggung
- c. Presentase Pelayanan surat pindah datang tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus surat pindah datang
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah warga terlambat mendaftarkan surat pindah karena surat pindah ada masa berlakunya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi pelayanan Adminduk
- d. Presentase penerbitan akta kematian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - adanya program sanku (santunan kematian) dari Dinsoso yang mempersyaratkan Akta Kematian sebagai salah satu syarat pengurusan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendafataran Akta kematian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi Pelayanan Adminduk
- e. Cakupan Akta perkawinan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendaftaran Akta perkawinan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi perkawinan dan perceraian non muslim dengan pemuka agama
- f. Cakupan Akta Perceraian tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akan pentingnya mengurus Akta perkawinan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - i. Tidak dapat melengkapai pesyaratan pendaftaran Akta Perceraian
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Sosialisasi perkawinan dan perceraian non muslim dengan pemuka agama
- g. Persentase kerja sama pemanfaatan data kependudukan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya FaktorpendorongindikatortersebutadalahadanyaPermendagri Nomor 102 Tahun 2019tentangpemberianhakakses dan pemanfaatan data kependudukan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Pemanfaatan Data Di SKPD tidakmaksimal
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Perlu ada kebijakan daerah tentang komitmen penggunaan data
 - Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan
 - BekerjasamandenganDiskominfountukpengintegrasian data
- h. Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Akan menambah inovasi penunjang pelayanan Adminduk
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Keterbatasananggaran
 - Masyarakat

sebagai pengguna inovasi pelayanan belum terbiasa dengan perubahan

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Tersedianya programmer untuk pengembangan aplikasi pelayanan Adminduk. Mentarget setiap tahun ada minimal 2 inovasi pelayanan Adminduk.
 - Mencari Referensi Dinas Dukcapil Kota / Kabupaten lain untuk referensi inovasi
 - Menggencarkan sosialisasi tentang inovasi pelayanan
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 terdiri dari:
 - a. Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - sosialisasi Kia ke sekolah-sekolah dan jemput bola untuk perekaman KIA di sekolah-sekolah
 - memberikan kesempatan kepada desa, sekolah, PP dll untuk meminta pelayan dari Dinas Dukcapil dalam perekaman KIA (Dinas akan melaksanakan jemput bola)
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - Kurang pedulinya masyarakat tentang arti penting KIA misalnya untuk mendaftar sekolah blm di pesyaratkan
 - walaupun sudah adanya kerjasama pemanfaatan KIA dengan pihak ketiga untuk pemberian diskon tapi karena kondisi geografis di Temanggung sehingga blm bisa maksimal pemanfaatannya
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - Melaksanakan jemputbola ke Sekolah-sekolah dan ke Desa
 - b. Presentase kepemilikan Akta kelahiran
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - Perpres No 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - terbitnya perda no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan adminduk
 - sosialisasi adminduk dan jemput bola secara berkelanjutan dengan mengandeng PKK dan perangkat desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masyarakat pedulinya masyarakat akan fungsi dari Akta Kelahiran terutama Untuk Penduduk Usia Lanjut
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

- Sosialisasi dengan tim penggerak PKK3
 - Jemput bola akta kelahiran ke Desa
- c. Presentase Sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - setiap tahunnya menggandakan untuk pembelian/ pengadaan sarpras peralatan KTP-EL
 - tersedianya anggaran untuk penggantian suku cadang dan pemeliharaan peralatan KTP el
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - kebutuhan peralatan KTP-el yang banyak sementara anggaran untuk perbaikan dan atau untuk pengadaan blm bisa mencukupi
 - kenayakan peralatan KTP el merupakan aset pusat yang blm dihibahkan ke daerah sehingga untuk perbaikan tidak bisa di anggarakan lewat DAU
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - di setujuinya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP Elektronik dan SIAK

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

A. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam RPJMD telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik

Berdasarkan UU no 25 tahun 2009 bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan penyelenggaraan dan pelaksana dalam memenuhi komponen standar pelayanan Publik sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Menjadi target pencapaian RPJMN tahun 2015 – 2019, mengetahui kompetensi pelaksana layanan dan persepsi pengguna layanan. Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara dan pelaksana terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik diperoleh dengan penilaian sesuai variabel dan indikator seperti pada tabel di bawahini :

Tabel 1.5

Variabel dan Indikator

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
1	Standar Pelayanan	Persyaratan	6
		Sistem mekanisme dan prosedur	6
		Produk Pelayanan	6
		Jangka Waktu Penyelesaian	12
		Biaya/ Tarif	12
2	Maklumat Layanan	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	12
3	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet, 271as an27, website, monitor televisi, dll)	12
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Ketersediaan ruang tunggu	3
		Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2
		Ketersediaan loket/ meja pelayanan	3
5	Pelayanan Khusus	Ketersediaan Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll)	2
		Ketersediaan Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	2
6	Pengelolaan Pengaduan	Ketersediaan Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll)	5
		Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan	3
		Ketersediaan Pejabat / Petugas Pengelola Pengaduan	5

No	Variabel Penilaian	Komponen Indikator	Bobot
7	Penilaian Kinerja	Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan	3
8	Visi, Misi dan Motto Pelayanan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2
		Ketersediaan Motto Pelayanan	2.5
9	Atribut	Ketersediaan Petugas Penyelenggaraan menggunakan ID Card	2.5
10	Pelayanan Terpadu (Jawaban Pilihan harus satu yang dipilih)	a) Pelayanan Terpadu Tingkat Kementerian Lembaga	10
		b) Pelayanan Terpadu Tingkat Direktorat Jenderal/Deputi	7
		c) Pelayanan terpadu Tingkat Direktorat/Direktur/Eselon III	5
		d) Bukan Pelayanan Terpadu	0

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 Temanggung untuk tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Publik di Kabupaten Temanggung diperoleh hasil dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 1.6
Nilai Survei Kepatuhan Tahun 2015-2020

No	Tahun	Hasil	Zona
1	2015	34,46	Merah
2	2016	59,76	Kuning
3	2017	55	Kuning
4	2018	76	Kuning
5	2019	76*	Kuning
6	2020	76*	Kuning

Sumber : Bagian Ortala Setda 2019

*data tahun 2019 dan 2020 masih disamakan dengan data tahun 2018

Keterangan Kategorisasi Penilaian Pemerintah Daerah :

Nilai	Tingkat Kepatuhan	Zona
0 – 50	Rendah	Merah
51 – 80	Sedang	Kuning
81 – 100	Tinggi	Hijau

Sumber : Bagian Ortala Setda, 2019

Untuk nilai tingkat kepatuhan pada tahun 2017 menurun tapi pada tahun 2018 sudah meningkat kembali sementara Untuk tahun 2019 data dari Bagian ortala belum keluar. Dinas Dukcapil melaksanakan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat secara Mandiri yang dilakukan pada Pelayanan Akta kelahiran Pada dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dengan nilai 82.0.

Dari data tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa survey tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik di Kabupaten Temanggung semakin baik namun masih perlu ditingkatkan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memberikan apresiasi (*award*) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya telah mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.
- b. Menyelenggarakan program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
- c. Memberikan teguran dan mendorong para pimpinan Perangkat Daerah yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.

2. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota.

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100%. Presentase kepemilikan Kartu Keluarga disajikan pada tabel berikut ini.

Tabell.7

Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	245.174	241.177	246.575	251.334	257.391	257.772
2	Jumlah KK	253.878	252.922	256.127	258.294	263.885	262.643
3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96.57	95.36	96.27	97.30	97,54	98.15

Sumber : DKB Smester II tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Dari tabel di atas diperoleh angka jumlah kepemilikan KK menurun pada tahun 2016 karena adanya jempit bola akta kematian ke 289 desa dan kelurahan dalam rangka pemuktahiran data sehingga banyak data yang digunakan pada tahun 2015 adalah data pelayanan sedangkan pada tahun 2016 s/d 2020 meningkat karena sudah menggunakan data konsolidasi bersih (DKB) dari Kemendagri. Jumlah penduduk yang belum mempunyai Kartu Keluarga pada tahun 2020 sebanyak 4.871 Kepala Keluarga diantaranya disebabkan oleh :

- Pasangan baru menikah belum mengajukan permohonan pisah KK
- Dalam satu rumah harusnya terdapat dua kepala keluarga tapi tidak mengajukan pisah KK

Persebaran kepemilikan KK di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawahini :

Tabell.8Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

NO	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Kepemilikan KK	Persentase kepemilikan KK (%)	Yang belum memiliki KK
1	BULU	16.193	15.932	98,39	261
2	TEMBARAK	9.774	9.472	96,91	302

3	TEMANGGUNG	26.896	26.457	98,37	439
4	PRINGSURAT	17.489	17.022	97,33	467
5	KALORAN	15.658	15.344	97,99	314
6	KANDANGAN	17.117	16.915	98,82	202
7	KEDU	19.573	19.034	97,25	539
8	PARAKAN	17.471	17.092	97,83	379
9	NGADIREJO	18.693	18.505	98,99	188
10	JUMO	10.341	10.163	98,28	178
11	TRETEP	7.067	6.976	98,71	91
12	CANDIROTO	11.001	10.834	98,48	167
13	KRANGGAN	16.536	16.232	98,16	304
14	TLOGOMULYO	7.647	7.537	98,56	110
15	SELOPAMPANG	6.488	6.370	98,18	118
16	BANSARI	8.035	7.933	98,73	102
17	KLEDUNG	9.430	9.265	98,25	165
18	BEJEN	7.282	7.163	98,37	119
19	WONOBOYO	8.599	8.260	96,06	339
20	GEMAWANG	11.353	11.266	99,23	87
	Jumlah	262.643	257.772	98,15	4.871

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kedu yang belum memiliki KK terbanyak sebesar 539 Kepala Keluarga.

3. Presentase Kepemilikan KTP el

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP el dihitung dengan cara membagi Jumlah penduduk yang memiliki KTP el dibagi Jumlah wajib KTP el.

Wajib KTP el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Presentase kepemilikan KTP el disajikan pada table berikut ini.

Tabel1.9

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-Tahun 2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17tahun yang ber-KTP (jiwa)	576.722	525.804	552.100	579.350	589.079	583.924
2	Jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah (jiwa)	580.530	578.357	587.274	587.125	591.955	594.852
	Persentase (%)	97,72	97,30	96,87	98,67	99,51	98.16

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari table diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015–2017 cenderung menurun, karena penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Pada tahun 2018 dan 2019 terus meningkat, sementara pada tahun 2020 menurun dikarenakan adanya covid-19 sehingga untuk pelayanan perekaman KTP-el sempat berhenti, setelah Dinas Dukcapil melaksanakan perekaman kembali untuk faktor kehati-hatian dan menghindari kerumunan kami membatasi jumlah pemohon perekaman sehingga belum semua wajib KTP dapat melaksanakan rekam data KTP-el. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP

yang belum memiliki KTP el pada tahun 2020 adalah 10.928 jiwa, yang tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawahini.

Tabel 1.10

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Wajib KTP el	Jumlah kepemilikan KTP el	Presentase Kepemilikan KTP el	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	BULU	36.495	35.859	6,14%	636
2	TEMBARAK	22.744	22.199	3,80%	545
3	TEMANGGUNG	62.157	61.237	10,49%	920
4	PRINGSURAT	39.488	38.856	6,65%	632
5	KALORAN	35.246	34.581	5,92%	665
6	KANDANGAN	38.747	38.117	6,53%	630
7	KEDU	43.852	42.922	7,35%	930
8	PARAKAN	40.157	39.479	6,76%	678
9	NGADIREJO	42.207	41.513	7,11%	694
10	JUMO	23.008	22.564	3,86%	444
11	TRETEP	15.915	15.457	2,65%	458
12	CANDIROTO	24.907	24.462	4,19%	445
13	KRANGGAN	36.874	36.312	6,22%	562
14	TLOGOMULYO	17.089	16.779	2,87%	310
15	SELOPAMPANG	15.141	14.821	2,54%	320
16	BANSARI	18.287	17.990	3,08%	297
17	KLEDUNG	20.875	20.471	3,51%	404
18	BEJEN	16.432	16.157	2,77%	275
19	WONOBOYO	19.971	19.479	3,34%	492
20	GEMAWANG	25.260	24.669	4,22%	591
JUMLAH		594.852	583.924		10.928

Sumber : DKB Semester II 2020. Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Temanggung adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 920 jiwa hal ini disebabkan karena :

1. Pelayanan Perekaman KTP el sempat ditunda karena adanya Covid-19 sehingga jumlah pemohon terus meningkat.
2. Dinas Dukcapil melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el secara terbatas dikarenakan Covid-19
3. Tidak semua kecamatan dapat melaksanakan perekaman KTP-el terkendala peralatan yang rusak

4. Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Presentase Kepemilikan KIA dihitung dengan rumus : jumlah anak yang memiliki KIA dibagi dengan jumlah wajib KIA.

Wajib Kia adalah anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.

Presentase Kepemilikan KIA bias dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1.11

Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	na	43.310	65.321	76.625	117.231	132.497
2	Jumlah wajib KIA	na	189.933	185.015	193.137	221.911	232.772
3	Presentase Kepemilikan KIA	na	22,80	35,30	45,51	52,83	56.92

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kepemilikan KIA selama 3 tahun terdapat kenaikan yang signifikan karena adanya jemput bola pelayanan KIA di sekolah dan di pusat-pusat keramaian. Dasar dari Kegiatan Penerbitan KIA adalah Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2016 Kabupaten Temanggung merupakan satu dari enam belas kabupaten/kota yang diuji cobakan untuk penerbitan KIA tingkat Nasional dikarenakan prosentase kepemilikan Akta kelahiran yang tinggi, sehingga data kepemilikan KIA disajikan dari tahun 2016. Dapat dilihat presentase kepemilikan KIA dari tahun 2016 s/d 2020 terus meningkat .

Persebaran kepemilikan Kartu Identitas Anak di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel1.12

Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan	Jumlah anak wajib KIA	Kepemilikan KIA	Presentase kepemilikan KIA	Jumlah anak yang belum memiliki KIA
1	BULU	15.175	9.360	61,68	5.815
2	TEMBARAK	7.915	4.337	54,79	3.578
3	TEMANGGUNG	6.492	2.730	42,05	3.762
4	PRINGSURAT	21.198	16.113	76,01	5.085
5	KALORAN	25.949	19.584	75,47	6.365
6	KANDANGAN	6.497	3.417	52,59	3.080
7	KEDU	11.059	6.310	57,06	4.749
8	PARAKAN	5.795	2.555	44,09	3.240
9	NGADIREJO	13.487	7.332	54,36	6.155
10	JUMO	14.978	9.899	66,09	5.079
11	TRETEP	11.977	7.268	60,68	4.709
12	CANDIROTO	14.937	6.124	41,00	8.813
13	KRANGGAN	16.636	7.916	47,58	8.720
14	TLOGOMULYO	16.195	7.866	48,57	8.329

15	SELOPAMPANG	7.838	3.744	47,77	4.094
16	BANSARI	9.139	3.441	37,65	5.698
17	KLEDUNG	8.656	4.766	55,06	3.890
18	BEJEN	5.906	3.972	67,25	1.934
19	WONOBOYO	5.835	2.831	48,52	3.004
20	GEMAWANG	7.113	2.932	41,22	4.181
JUMLAH		232.777	132.497	56,92	100.280

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 100.280 anak atau sebanyak 43.08 %.

5. Persentase Pelayanan Surat Pindah dan Datang Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke Kabupaten/Kota/Provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

Selanjutnya dengan SKP digunakan sebagai dasar mengurus KK, KIA atau KTP el di alamat baru atau tempat kedatangan.

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah surat pindah datang yang diterbitkan tepat waktu pada tahun N dibagi jumlah pemohon surat pindah datang pada tahun N.

Persentase pelayanan surat pindah/datang tepat waktu bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.13

Persentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penerbitan pindah datang tepat waktu	Na	6.648	6.027	6.470	9176	13.494
2	Jumlah pemohon surat pindah dan datang	Na	6.648	6.027	6.470	9176	13.494
3	Presentase Pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu	Na	100	100	100	100	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas bias dilihat bahwa presentase pelayanan surat pindah dan datang tepat waktu tercapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pemohon surat pindah dan datang sudah terlayani secara tepat waktu.

Tabel 1.14

pelayanan surat pindah dari bln januari s/d Desember 2020

Bulan	Pemohon Surat Pindah Datang	Surat pindah datang yang diterbitkan	Presentase pemohon yang terlayani (%)
JANUARI	1.720	1.720	100
FEBRUARI	1.042	1.042	100
MARET	945	945	100
APRIL	554	554	100
MEI	451	451	100
JUNI	1.509	1.509	100
JULI	1.431	1.431	100
AGUSTUS	1.062	1.062	100
SEPTEMBER	1.294	1.294	100
OKTOBER	1.031	1.031	100
NOVEMBER	1.204	1.204	100
DESEMBER	1.211	1.211	100
	13.494	13.494	100

Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pemohon surat pindah dan datang pada bulan april dan maret rendah sementara pada bulan juni sudah naik kembali hal ini dikarenakan pada pertengahan bulan maret pelayanan hanya dilaksanakan secara daring online karena adanya Covid-19 sedangkan pada bulan juni sudah naik kembali karena sudah memasuki era New normal.

6. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kelahiran adalah akta Catatan Sipil.

Presentase kepemilikan akta kelahiran dihitung denganrumus : jumlah Jiwa yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1.14

Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	442.188	472.459	489.614	514.790	530.737	551.910
2	Jumlah penduduk	760.297	768.339	772.289	783.550	791.264	795.556
3	Presentase Kepemilikan Akta kelahiran	58.16	61.49	63.40	65.70	67,07	69.37

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa angka kepemilikan akta kelahiran naik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran serta perubahan regulasi pemerintah pusat yang mempermudah beberapa syarat pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil. Jumlah jiwa yang belum mempunyai akta kelahiran adalah 243.646 jiwa dan tersebar di 20 Kecamatan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15

Penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran di Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Memiliki Akta Kelahiran		Tidak Memiliki Akta Kelahiran	
		jiwa	%	Jiwa	%
1	BULU	33.999	6,16%	14.841	6,09%
2	TEMBARAK	21.357	3,87%	9.917	4,07%
3	TEMANGGUNG	63.772	11,55%	19.366	7,95%
4	PRINGSURAT	38.065	6,9%	14.393	5,91%
5	KALORAN	30.156	5,46%	15.909	6,53%
6	KANDANGAN	37.693	6,83%	14.955	6,14%
7	KEDU	38.880	7,04%	20.055	8,23%
8	PARAKAN	38.863	7,04%	15.034	6,17%
9	NGADIREJO	40.254	7,29%	16.667	6,84%
10	JUMO	21.823	3,95%	8.349	3,43%
11	TRETEP	12.163	2,2%	9.075	3,72%
12	CANDIROTO	22.121	4,01%	10.736	4,41%
13	KRANGGAN	34.778	6,3%	14.476	5,94%
14	TLOGOMULYO	15.655	2,84%	7.432	3,05%
15	SELOPAMPANG	15.424	2,79%	5.041	2,07%
16	BANSARI	16.761	3,04%	7.537	3,09%
17	KLEDUNG	18.035	3,27%	9.974	4,09%
18	BEJEN	14.686	2,66%	7.007	2,88%
19	WONOBOYO	16.505	2,99%	10.035	4,12%
20	GEMAWANG	20.920	3,79%	12.847	5,27%
	Jumlah	551.910	69.37 %	243.646	30.63 %

Sumber : DKB semester I I 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa Kecamatan yang paling banyak penduduknya belum memiliki akta kelahiran adalah Kecamatan Kedu yaitu sebanyak 20.055 jiwa atau 8.23 %

7. Presentase Penerbitan Akta Kematian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil.

Persentase penerbitan akta kematian dihitung dengan rumus : jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah pemohon akta kematian.

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.16

Persentase Penerbitan Akta Kematian Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 s.d TW IV

	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	0	11.018	3.443	8.666	5.023
2	Jumlah pemohon akta kematian	0	11.018	3.443	8.666	5.023
3	Presentase penerbitan akta kematian		100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Penerbitan akta kematian pada dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Temanggung baru tersaji pada tahun 2017 yang pencapaiannya cukup tinggi karena adanya jemput bola akta kematian. pada tahun 2018 turun dan pada tahun 2019 kembali karena adanya PROGRAM SANKA program pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kematian keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk tahun 2020

pelaporan kematian pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menurun karena pelayanan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dan lebih mengutamakan pelayanan secara online sementara masyarakat masih beranggapan bahwa pelayanan secara online sulit dan itu sangat berpengaruh pada pelaporan akta kematian.

8. Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perkawinan merupakan akta Catatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perkawinan penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama. Batasan waktu Pelayanan Akta Perkawinan Tepat Waktu adalah 3 hari.

Persentase pelayanan akta perkawinan non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perkawinan yang telah diterbitkan dibagi dengan jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim dikali 100%.

Tabel1.18

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	194	132	174	172	133	151
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	194	132	174	172	133	151
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAB. Temanggung s/d bulan Desember 2020

Dari daftar tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pencatatan perkawinan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya dan tidak ada permohonan pencatatan perkawinan yang tidak diterbitkan akta perkawinannya. Jumlah kepemilikan akta perkawinan (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.19

Keperwakilan Akta Perkawinan per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	12.390	57,03%	9.337	42,97%	21.727	6,52%
2	33.23.02	TEMBARAK	7.472	52,91%	6.649	47,09%	14.121	4,24%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	18.941	55,13%	15.414	44,87%	34.355	10,31%
4	33.23.04	PRINGSURAT	13.328	50,91%	12.852	49,09%	26.180	7,86%
5	33.23.05	KALORAN	9.999	53,44%	8.712	46,56%	18.711	5,62%
6	33.23.06	KANDANGAN	12.049	55,65%	9.602	44,35%	21.651	6,5%
7	33.23.07	KEDU	14.625	61,08%	9.319	38,92%	23.944	7,19%
8	33.23.08	PARAKAN	11.040	57,72%	8.088	42,28%	19.128	5,74%
9	33.23.09	NGADIREJO	9.765	56,02%	7.665	43,98%	17.430	5,23%
10	33.23.10	JUMO	7.685	62,49%	4.613	37,51%	12.298	3,69%
11	33.23.11	TRETEP	5.776	49,55%	5.881	50,45%	11.657	3,5%
12	33.23.12	CANDIROTO	7.943	62,28%	4.810	37,72%	12.753	3,83%
13	33.23.13	KRANGGAN	11.842	59,44%	8.082	40,56%	19.924	5,98%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.912	49,73%	5.977	50,27%	11.889	3,57%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	4.837	48,74%	5.088	51,26%	9.925	2,98%
16	33.23.16	BANSARI	6.510	49,51%	6.638	50,49%	13.148	3,95%
17	33.23.17	KLEDUNG	6.268	61,31%	3.956	38,69%	10.224	3,07%
18	33.23.18	BEJEN	4.924	52,68%	4.423	47,32%	9.347	2,81%
19	33.23.19	WONOBOYO	6.152	63%	3.613	37%	9.765	2,93%
20	33.23.20	GEMAWANG	8.271	55,48%	6.637	44,52%	14.908	4,48%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			185.729	55,76%	147.356	44,24%	333.085	0,00

Sumber : DKB semester II 2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

9. Persentase Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta perceraian merupakan akta Cacatatan sipil. Akta Perceraian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri. Batasan waktu Pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu adalah 4 hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mencatatkan perceraian bagi penduduk yang beragama Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Persentase pelayanan akta perceraian non muslim tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah kutipan akta perceraian yang telah diterbitkan dibagi jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim.

Tabel 1.20

Persentase Pelayanan Akta Perceraian Non Muslim
Tepat Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	31	28	41	27	32	40
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	31	28	41	27	32	40
3	Presentase pelayanan akta perceraian non muslim	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : SI-KUDA Sistem Informasi Kumpulan data Jateng KAB. Temanggung s/d bulan Desember 2020

Jika dilihat dari tabel yang ada diatas maka setiap pencatatan perceraian yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semuanya telah diterbitkan akta perceraianya, tidak ada permohonan pencatatan perceraian yang didaftarkan yang tidak diterbitkan akta perceraianya. Jumlah kepemilikan akta Perceraian (muslim dan non muslim) di 20 Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.21

Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten
Temanggung Tahun 2020 s.d TW IV

No	Kecamatan		Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian					
			Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	33.23.01	BULU	331	45.03%	404	54,97%	735	7,12%
2	33.23.02	TEMBARAK	157	45.38%	189	54,62%	346	3,35%
3	33.23.03	TEMANGGUNG	603	39.62%	919	60,38%	1.522	14,75%
4	33.23.04	PRINGSURAT	391	44.43%	489	55,57%	880	8,53%
5	33.23.05	KALORAN	210	42.08%	289	57,92%	499	4,84%
6	33.23.06	KANDANGAN	272	44.16%	344	55,84%	616	5,97%
7	33.23.07	KEDU	313	41.68%	438	58,32%	751	7,28%
8	33.23.08	PARAKAN	281	42.19%	385	57,81%	666	6,46%
9	33.23.09	NGADIREJO	253	46.85%	287	53,15%	540	5,23%
10	33.23.10	JUMO	108	39.42%	166	60,58%	274	2,66%
11	33.23.11	TRETEP	113	46.12%	132	53,88%	245	2,37%
12	33.23.12	CANDIROTO	177	37.34%	297	62,66%	474	4,59%
13	33.23.13	KRANGGAN	279	42.08%	384	57,92%	663	6,43%
14	33.23.14	TLOGOMULYO	146	43.32%	191	56,68%	337	3,27%
15	33.23.15	SELOPAMPANG	86	40.95%	124	59,05%	210	2,04%
16	33.23.16	BANSARI	156	43.09%	206	56,91%	362	3,51%
17	33.23.17	KLEDUNG	135	50.37%	133	49,63%	268	2,6%
18	33.23.18	BEJEN	123	43.62%	159	56,38%	282	2,73%
19	33.23.19	WONOBOYO	107	42.8%	143	57,2%	250	2,42%
20	33.23.20	GEMAWANG	181	45.71%	215	54,29%	396	3,84%
21	33.23.99	LAINNYA	0	0%	0	0%	0	0%
Jumlah Total			4.422	42,87%	5.894	57,13%	10.316	0,00

Sumber : DKB semester II Tahun 2020 Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa sampai dengan tahun 2020 tingkat perceraian paling tinggi adalah di kecamatan temanggung sebanyak 1.522 orang atau 14.75 % dari total perceraian diKabupaten Temanggung.

10. Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik

Sarana dan prasarana Adminduk dalam kondisi baik adalah Sarana dan Prasarana yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik bisa dihitung denganrumus : jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia.

Presentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.22

Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam Kondisi Baik
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	440	420	400	352	324	376
2	Jumlah sarana prasarana Adminduk yang tersedia	570	600	627	648	648	698
3	Presentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik	77	70	63	54	50	53.86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas bias dilihat bahwa persentase sarana prasarana adminduk dalam kondisi baik semakin menurun, hal ini dikarenakan sebagian sarana prasaranaa dminduk yang ada kondisinya sudah rusak mengingat setiap hari peralatan tersebut digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan dan capil. Pada tahun 2020 sarana prasarana adminduk yang kondisinya rusak untuk pelayanan 324 dan 296 unit merupakan Peralatan dropping dari pusat yang mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki dengan dana APBD.

11. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Perjanjian kerjasama pemanfaatan data merupakan perjanjian yang dibuat antara Dindukcapil dengan instansi atau pihak lain yang akan memanfaatkan data kependudukan yang dimiliki Dindukcapil. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dihitung dengan rumus : jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data dibagi jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan di Kabupaten Temanggung.

Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.23

Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan PKS pemanfaatan data	na	na	3	7	21	21
2	Jumlah perangkat daerah pengguna data kependudukan	na	na	21	21	21	21
3	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	na	na	14,29	33,3	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 semua perangkat daerah pengguna data kependudukan telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data sebelum tahun 2017 kosong dikarenakan Kerjasama Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan merupakan kegiatan baru dituangkan dalam SOTK dari kemendagri.

12. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah inisiatif terobosan dari Dindukcapil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat dihitung dengan rumus : jumlah inovasi layanan dibagi jenis layanan di Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil. Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.24

Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah inovasilayanan	na	na	6	12	20	29
2	JenisLayanan	na	na	31	31	31	31
3	Presentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	na	na	19,36	38,71	64,52	93,55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2020

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah layanan yang berinovasi pada tahun 2020 sudah bertambah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

Pelayanan yang sudah berinovasi adalah :

1. Penerbitan KK bagi orang asing;
2. Penerbitan KTP bagi orang asing;
3. Penerbitan Surat Keterangan Pindah/pindah datang antar Kab/Kota dalam satu provinsi dan/atau antarprovinsi;
4. Penerbitan Surat PindahDatang orang asingdalam wilayah Indonesia;
5. Penerbitan Surat pindah datang antar negara untuk WNI;
6. Penerbitan Akta Perkawinan;
7. Penerbitan Akta Kelahiran;
8. Penerbitan Akta Perceraian;
9. Penerbitan Akta Kematian;
10. Pencatatan Perubahan Nama;
11. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;
12. Pembatalan Perkawinan;
13. Pembatalan Akta Perkawinan;
14. Penerbitan Kutipan Aktake 2 (Kedua) Akta Kelahiran;
15. Kutipanke 2 (Kedua) Akta Perkawinan;
16. PenerbitanKutipanke 2 (Kedua) Akta Perceraian;
17. PenerbitanKutipanke 2 (Kedua) Akta Kematian;

18. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
 19. Pemutakhiran Database Kependudukan;
 20. Penerbitan KTP Elektronik.
 21. Legalisasi Kutipan Akta Catatan Sipil;
 22. Penerbitan Surat keterangan pindah datang antar negara untuk orang asing;
 23. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 24. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
 25. Pencatatan Pengesahan Anak;
 26. Pencatatan Pengangkatan Anak;
 27. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 28. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengakuan Anak;
 29. Penerbitan Kutipan ke 2 (Kedua) Akta Pengesahan Anak;
- Sedangkan pelayanan yang belum berinovasi adalah :

1. Pelaporan dan Penerbitan Tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata penduduk yang terjadi di luar negeri;
Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencatatan Perkawinan di luar Kabupaten/Kota atau luar negeri;

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dari 12 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
 - Indikator Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Dokumen Kependudukan terutama KIA dan juga karena kondisi geografis di Kabupaten Temanggung sehingga pemanfaatan KIA blm dapat maksimal

- Indikator persentase Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Hal ini disebabkan karena Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat usia lanjut

- Indikator Presentase Sarana Prasarana Adminduk dalam kondisi baik

Hal ini disebabkan karena peralatan KTP el merupakan asset pusat yang belum dihbahhkan ke daerah sehingga tidak dapat melaksanakan perbaikan dengan menggunakan anggaran DAU

Anggran untuk perbaikan dan atau pemenuhan kebutuhan peralatan KTP el belum dapat memenuhi kebutuhan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat usia lanjut;
2. Perlunya pengelolaan data kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan data OPD yang lain;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan transparan;
4. Perlunya layanan on-line pada seluruh wilayah Desa/ Kelurahan, agar pelayanan administrasi kependudukan mudah diterima oleh masyarakat.

Adanya kebijakan dalam pelayanan kependudukan yaitu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini dapat berimplikasi timbulnya kekurangpedulian masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan

program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal ;
2. Ada 3 kegiatan yang pagu anggarannya melampaui rancangan awal RKPD sesuai hasil analisis kebutuhan, yaitu antara lain kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Jasa Pelayanan Perkantoran
 - c. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor

adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	33	laporan	1.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	33	laporan	1.000.000		
								koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		CD untuk DKB	20 26 285	kec opd ds/kel	7.150.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
	Administrasi Keuangan					2.993.087.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.993.087.346
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	30	buah	7.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					109.085.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	13.990.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Evaluasi kinerja Perangkat daerah		terbayarnya honorarium tim pendukung pelayanan dminduk	965	bulan	169.600.000
	Administrasi Keuangan					2.993.087.346
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.993.087.346
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					446.379.900
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	30	buah	7.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		terlaksananya sos, bimtek, koordinasi pelayanan adminduk	12	bulan	438.879.900
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					937.902.060
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		tersedianya komponen komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	608.477.480

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	1.895.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	1.895.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	5.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	2.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bulan	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	1.200.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	1.199.880	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersedianya makanan dan minumam	12	bulan	30.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu		tersedianya makanan dan minumam	12	bulan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	40.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	224.883.700	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					115.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					114.990.390	
	Pengadaan Mebel		tersedianya meja dan kursi kantor	2	paket	20.000.000		Pengadaan Mebel		tersedianya meja dan kursi kantor	2	paket	19.999.700	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	3	paket	95.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	3	paket	94.990.690	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.209.500.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.611.127.660	
	Penyediaan jasa Surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	2.000.000		Penyediaan jasa Surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	139.968.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	17.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.050.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		tersedianya jasa administrasi keuangan	12	bulan	1.451.659.66	
			tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor							tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	12	bulan		
										terlaksananya pelaynan adminduk	12	bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					151.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan					150.996.864	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	65.000.000
	Pemeliharaan Mebel		terlaksanya pemeliharaan alat mebel	12	bulan	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	80.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						844.020.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						80.000.000
Pelayanan pendaftaran penduduk						80.000.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Teman ggung	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	30.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		♦ terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ♦ tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	64.997.000
	Pemeliharaan Mebel		terlaksanya pemeliharaan alat mebel	12	bulan	5.999.864
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	bulan	80.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						1.740.520.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						80.000.000
Pelayanan pendaftaran penduduk						80.000.000
	Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Kab Tmg	tersedianya data penduduk yang valid	19	desa	30.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksananya penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	50.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					80.000.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					80.000.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	50.000.000
			terbitnya Akta Perceraian non muslim	50	akta	
		Kab Temanggung	terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	400	buku	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	
			tersediannya ekstra fooding petugas pengelola arsip	12	orang	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	penduduk					
			terlaksananya pelayanan adminduk	20	kec	
	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan		terlaksananya penerbitan KIA di Kab. Temanggung	26000	keping	50.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					80.000.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil					80.000.000
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab Temanggung	terbitnya Akta perkawinan Non muslim	235	akta	50.000.000
			terbitnya Akta Perceraian non muslim	50	akta	
		Kab Temanggung	terjilidnya register dan berkas persyaratan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian	400	buku	
			terlaksananya fumigasi ruang arsip	840	m3	
			tersediannya ekstra fooding petugas pengelola arsip	12	orang	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						
	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Temanggung	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	30.000.000
			terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6.000	akta	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					684.020.000
	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					40.000.000
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Kab Temanggung	Terselenggarannya inovasi pelayanan kependudukan dan capil	3	jenis	40.000.000
			terlaksannya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	21	opd	
			tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat	12	bulan	
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					644.020.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	Kab Temanggung	terbitnya akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	11000	akta	30.000.000	
			terbitnya akta kematian bekerjasama dg instansi terkait	6.000	akta		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					1.075.320.000	
	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					40.000.000	
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	Kab Temanggung	Terselenggarannya inovasi pelayanan kependudukan dan capil	3	jenis	40.000.000	
			terlaksannya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	21	opd		
			tersedianya informasi yang dapat di akses masyarakat	12	bulan		
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan					1.035.320.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Temanggung	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan	644.020.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Kab Temanggung	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan pemeliharaan KTP el	12	bulan		penambahan 11 unit KTP el
			tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan					tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat	12	bulan		
			terlasannya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd					terlasannya pengelolaan jaringan siak dan KTP-el	20	opd		
			terlaksananya pemeliharaan ktp el	12	bulan					terlaksananya pemeliharaan ktp el	12	bulan		
			tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket					tersediannya peralatan mobile KTP-el	1	paket		
			terlaksana pelayanan adminduk	12	bulan					terlaksana pelayanan adminduk	12	bulan		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Berikut ini tabel usulan program dan kegiatan masyarakat :

3. Tabel 2.5

4. Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. APDK (Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan) online
APDK ini dipasang di 289 Desa/Kelurahan yang digunakan untuk memutakhirkan data kependudukan dan dilengkapi dengan formulir-formulir kependudukan, surat pengantar, surat keterangan dan berbagai fitur yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat Desa.
- b. Pemanfaatan Data (Integrasi Data Kependudukan)
Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP el kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
- c. TAK USAH BAPER (Tertib Administrasi Kependudukan Usai Sah Membuat akta Perceraian)
Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dindukcapil dengan Pengadilan Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP setelah perceraian.
- d. MAHAMERU (Menikah harus memiliki KK dan KTP baru)

Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dindukcapil dengan Kementerian Agama Temanggung dan KUA se-Kabupaten Temanggung untuk percepatan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP setelah pernikahan.

- e. Pelayanan Online berbasis Web

Untuk pelayanan Akta kelahiran, Akta kematian, KK, Cetak KTP, KIA dan pengaduan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pengurusan adminduk, informasi penerbitan dokumen kependudukan serta informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil.
- f. Pelayanan Online berbasis Android

Pelayanan ini untuk memudahkan masyarakat agar lebih leluasa memilih model pelayanan yang diinginkan. Pelayanan meliputi Akta kelahiran, Akta kematian, KK, Cetak KTP, KIA dan pengaduan masyarakat. Di dalamnya juga terdapat informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pengurusan adminduk, informasi penerbitan dokumen kependudukan.
- g. Kerjasama Pemanfaatan KIA (Kartu Identitas Anak)

Kerjasama untuk meningkatkan pemanfaatan KIA untuk mendapatkan fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA (misalnya mendapatkan diskon, hadiah dan sebagainya). Sampai saat ini yang sudah melaksanakan kerjasama antara lain :

 - a. Pikatan Waterpark potongan tiket sebesar Rp. 3.000,-
 - b. Toko ATK Kondang potongan harga antara 5-10%
 - c. Toko ATK Doremi potongan harga antara 5%
 - d. Lukito Group potongan harga antara 10%
- h. BUNDAKU (Ibu melahirkan dapat akta kelahiran dan KK baru)

Kerjasama Dindukcapil dengan Dinas Kesehatan untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi bayi baru lahir di Puskesmas.
- i. DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan), dalam rangka mewujudkan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Desa/Kelurahan.
- j. BERKIBAR (Bersama Kitra Bisa melayani Masyarakat). Merupakan Pelayanan Terintegrasi antara Dukcapil dengan KODIM 0706, Polres Temanggung, Pengadilan Negeri Temanggung, Pengadilan Agama Temanggung, Kementerian Agama Temanggung dan BKPSDM Kabupaten Temanggung
 1. KODIM 0706 Temanggung, POLRES TEMANGGUNG Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan BKPSDM berkaitan dengan sinergitas penerbitan dengan sinergitas penerbitan KTP-el, KK dan/atau Akta-akta Pencatatan Sipil bagi anggota ASN baru, anggota ASN yang menikah, bercerai atau meninggal dunia
 2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Temanggung berkaitan dengan sinergitas penerbitan Akta Perceraian, Akta kematian,

Pengangkatan Anak, Perubahan nama, asal-usul anak dan peristiwa penting lainnya bagi pencari keadilan.

Tabel 2.4
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	APDK (Aplikasi Pemutakhiran Data Kependudukan) online	Dukcapil, Desa / Kelurahan	APBD	Pemuktahiran data kependudukan yang di lengkapi dengan formulir-formulir, surat pengantar, surat keterangan dan fitur- fitur guna mempermudah pelayanan dok. adminduk dan di pasang di 289 desa / kelurahan	Update data kependudukan	Mempermudah pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa / Kelurahan	Dukcapil – 2020
2	Pemanfaat Data (Integrasi Data Kependudukan)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Pelayanan dengan memanfaatkan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan	Memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan NIK, Data kependudukan dan KTP el kepada Perangkat Daerah dan Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.	Dukcapil - 2020
3	TAK USAH BAPER (Tertib Administrasi Kependudukan Usai Sah Membuat Akta Perceraian)	Dukcapil, Pengadilan Agama, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang telah cerai	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah perceraian	Dukcapil - 2020
4	MAHAMERU (Menikah Harus Memiliki KK dan KTP Baru)	Dukcapil, Kementerian Agama, KUA, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan KK dan Ktp baru bagi pasangan yang setelah menikah melalui KUA	Penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik	Memberikan kemudahan dan cepatnya penerbitan kartu keluarga dan ktp elektronik setelah	Dukcapil - 2020

						pernikahan	
5	Pelayanan Online berbasis WEB	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis WEB	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
6	Pelayanan Online Berbasis Android (TEMANGGUNG GANDEM POL)	Dukcapil, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan dokumen adminduk melalui pelayanan online yang berbasis Android	Dokumen adminduk (Akta kelahiran, Akta kematian, Cetak KTP, KIA) dan pengaduan masyarakat	Memberikan kemudahan dalam pembuatan dok.adminduk serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan pengurusan , penerbitan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dindukcapil	Dukcapil - 2020
7	Kerjasama Pemanfaat KIA (Kartu Identitas Anak)	Dukcapil, Pikatan Water Park, Toko Kondang, Toko Doremi, Lukito Grup, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Pemanfaatan Kartu Identitas Anak bagi masyarakat	Fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA	Meningkatkan pemanfaatan KIA untuk mendapatkan fasilitas tambahan bagi anak pemegang KIA (misalnya mendapatkan diskon, hadiah dan sebagainya)	Dukcapil - 2020
8	BUNDAKU (Ibu Melahirkan dapat Akta Kelahiran dan KK Baru)	Dukcapil, Dinkes, Puskesmas, Masyarakat Desa / Kelurahan	APBD	Penerbitan akta kelahiran bayi yang baru lahir di puskesmas	KK baru dan Akta Kelahiran	Memudahkan masyarakat dalam pembuatan Akta kelahiran bagi bayi baru lahir di puskesmas	Dukcapil - 2020
9	DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APBD	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021
10	BERKIBAR (Bersama Kita Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag,	APBD	•penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN	Dokumen kependudukan	•terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari	Dukcapil 2021

		BKPSDM, PN, PA		dalam lingkungan kerja •penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan		keadilan •pemuktahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yng akurat dan muktahir	
--	--	----------------	--	---	--	--	--

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 3 (tiga) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2,5
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "BAIK" Tahun 2019	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
2	Krenova " Kreasi dan Inovasi Perangkat Daerah" – Temanggung Gandem POL	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "sangat Baik" Tahun 2020	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
4	Krenova "Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah" BUNDAKU	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Di era new normal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menerapkan pelayanan online berbasis android, website dan whatsapp untuk dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Restra dan Renja. Dengan pelayanan online masyarakat tidak harus datang ke Dinas untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan cukup dari rumah saja dan Dokumen akan diantar sampai rumah pemohon

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2021
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,2	98
				Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	98,2	98.50
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	70,2	70
				Persentase Pelayanan Surat Pindah Datang tepat waktu	%	100	100
				Persentase Kepemilikan Kutipan akta kelahiran	%	75	69
				Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	96.5	100
				Cakupan Pelayanan Akta Perkawinan tepat waktu	%	100	100

			Cakupan Pelayanan Akta Perceraian tepat waktu	%	100	100
			Persentase Sarana Prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik	%	90	90
			Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	80	100
			Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	50	70

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)Kab. Temanggung Tahun 2022

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			RANCANGAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
		5.430.192.000			5.430.192.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.586.172.000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.586.172.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	(-)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	(-)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.150.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.600.000	
	Administrasi Keuangan	2.993.087.000		Administrasi Keuangan	2.993.087.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.087.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.993.087.346	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	(+)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.500.000	(+)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.085.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.085.000	(-)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.990.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	608.477.480	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.895.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.895.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	(-)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.000.000	
Pengadaan Mebel	20.000.000	Pengadaan Mebel	20.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.212.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.209.500.000	(-)

	Penyediaan jasa Surat menyurat	2.000.000		Penyediaan jasa Surat menyurat	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.050.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.000.000	(+)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	5000000		Pemeliharaan Mebel	6.000.000	(+)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80000000		² Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YNG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	844.020.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	844.020.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	80.000.000		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	80.000.000	
	Pelayanan pendaftaran penduduk	80.000.000		Pelayanan pendaftaran penduduk	80.000.000	
	Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	30.000.000		Penyelesaian masalah pendafataran penduduk	30.000.000	

	Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	50.000.000		Penerbitan Dokumen atas hasil Pelaporan Peristiwa kependudukan	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.000.000		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	80.000.000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	80.000.000		Pelayanan Pencatatan Sipil	80.000.000	
	Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000		Pencatatan, penata usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	50.000.000	
	Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	30.000.000		Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan sipil pengumpulan data kependudukan	30.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	684.020.000		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	684.020.000	
	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	40.000.000		Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	40.000.000	
	Kerjasama Pemanfatatan data kependudukan	40.000.000		Kerjasama Pemanfatatan data kependudukan	40.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	644.020.000		Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	644.020.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	644.020.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	644.020.000	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi pagu indikatif Tahun 2022 tetap sebesar Rp. 5.430.192.000

Tabel 3.3

**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progr am	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2														
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12								7,667,553,874					5,882,125,474
2	12	1							6,432,233,874					5,680,925,474
2	12	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				177,750,000					177,750,000
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,000,000				1,000,000
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	CD Untuk DKB CD Untuk DKB CD Untuk DKB				20 Kecamatan 26 OPD 285 Desa/Kelurahan	7,150,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7,150,000
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terbayarnya honor tim pendukung pelayanan adminduk				965 bulan	169,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		169,600,000
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,993,087,000					3,422,764,574
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan	2,993,087,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3,422,764,574
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				446,379,900					446,379,900

2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terlaksananya Disiplin Pegawai Dalam Menggunakan Pakaian Dinas		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Buah		7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,500,000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		terlaksananya sos, bimtek, koordinasi pelayanan adminduk				12 bulan		438,879,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				438,879,900
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								937,902,060					158,531,000
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen-Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		terpenuhinya blangko kia terpenuhinya ribbon cetak ktp dan kia Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 Bulan		608,477,480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,990,000
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,895,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,895,000
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,000,000

2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	1,199,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1,200,000
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	30,000,000
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	224,883,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40,000,000
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik		26 OPD	49,446,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	49,446,000
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				114,990,390		115,000,000
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	19,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20,000,000
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	94,990,690	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	95,000,000
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,611,127,660		1,209,500,000

2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,000,000	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		139,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				140,000,000	
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,500,000	
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		terlaksananya pelayanan adminduk		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,451,659,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,050,000,000	
							Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
							Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor				12 Bulan								
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									150,996,864					151,000,000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		64,997,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65,000,000	
							Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				12 Bulan								
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Alat Mebel		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,999,864	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,000,000	

2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							80,000,000					80,000,000	
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							80,000,000					80,000,000	
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Pelayanan Adminduk		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Kecamatan		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
							Tersedianya Data Penduduk Yang Valid				19 Desa							
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		terlaksananya pencetakan Dokumen kependudukan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000
							Terlaksananya Penerbitan KIA di Kab. Temanggung				26000 Keping							
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							80,000,000					80,000,000	
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							80,000,000					80,000,000	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Terbitnya Akta Perceraian Non Muslim		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Akta		50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000
							Terbitnya Akta Perkawinan Non Muslim				100 Akta							
							Terlaksananya Ekstra Fooding Petugas Pengelola Arsip				7 Orang							
							Terlaksananya Fumigasi Ruang Arsip				840 m3							
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Terbitnya Akta Kelahiran Berkerjasama Dengan Instansi Terkait		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18500 Akta		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
							Terbitnya Akta Kematian Berkerjasama Dengan Instansi Terkait				4500 Akta							

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 95.95 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 84.8 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 22.27 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 12.78 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 7.667.553.874,- yang terdiri dari 4 program antara lain program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota ;

Program Pendaftaran Penduduk ; program Pencatatan sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 September 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2															
2	12														
2	12	1							7,667,553,874					5,882,125,474	
2	12	1	2.01						6,432,233,874					5,680,925,474	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				177,750,000					177,750,000	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	CD Untuk DKB CD Untuk DKB CD Untuk DKB			1,000,000					1,000,000	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	CD Untuk DKB CD Untuk DKB CD Untuk DKB		20 Kecamatan 26 OPD 285 Desa/K elurahan	7,150,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				7,150,000	
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terbayarnya honor tim pendukung pelayanan adminduk			965 bulan	169,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			169,600,000	
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,993,087,000				3,422,764,574	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,993,087,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				3,422,764,574
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					446,379,900				446,379,900	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Disiplin Pegawai Dalam Menggunakan Pakaian Dinas		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Buah	7,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,500,000

2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksanannya sos, bimtek, koordinasi pelayanan adminduk				12 bulan		438,879,900	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				438,879,900
2	12	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen-Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya blangko kia terpenuhinya ribbon cetak ktp dan kia Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan 12 Bulan		608,477,480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13,990,000
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,895,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,895,000
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,000,000
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		1,199,880	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	12	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000

2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		224,883,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik				26 OPD		49,446,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				49,446,000
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									114,990,390				115,000,000	
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		Tersedianya Meja dan Kursi Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		19,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket		94,990,690	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				95,000,000
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,611,127,660				1,209,500,000	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2,000,000
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		139,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				140,000,000
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				17,500,000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		terlaksananya pelayanan adminduk		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		1,451,659,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,050,000,000
							Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus				

2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	224,883,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			40,000,000
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik		26 OPD	49,446,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			49,446,000
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						114,990,390			115,000,000
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	19,999,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			20,000,000
2	12	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	94,990,690	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			95,000,000
2	12	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,611,127,660			1,209,500,000
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			2,000,000
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	139,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			140,000,000
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	17,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			17,500,000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya pelayanan adminduk	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan	1,451,659,660	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1,050,000,000
						Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus			

					Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Keurufan		12 Bulan		Non Fisik				
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150,996,864					151,000,000
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertindaknya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan 12 Bulan	64,997,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65,000,000
2	12	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Tertindaknya Pemeliharaan Alat Mebel	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	5,999,864	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindaknya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	80,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				80,000,000					80,000,000
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80,000,000					80,000,000
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Tertindaknya Pelayanan Adminduk Tersedianya Data Penduduk Yang Valid	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Kecamatan 19 Desa	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	12	2	2.01	7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	terlaksananya pencetakan Dokumen kependudukan Tertindaknya Penerbitan KIA di Kab. Temanggung	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 26000 Keping	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				80,000,000					80,000,000
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				80,000,000					80,000,000
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terbitnya Akta Perceraian Non Muslim Terbitnya Akta Perkawinan Non Muslim Tertindaknya Ekstra Fooding Petugas Pengelola Arsip	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Akta 100 Akta 7 Orang	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				50,000,000

